KLIPPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu - Senin, 02 - 04 Maret 2019

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (halaman 12)	Senin, 04 Maret 2019	Penanganan Bencana: Rekonstruksi Kebahagiaan Palu	Lima bulan selepas bencana dasyat, rasa pedih masih menggelayuti warga Palu-Donggala-Sigi, Sulawesi Tengah. Namum secara berangsur kondisi Palu saat ini sudah lebih baik, kendati di beberapa lokasi masih terlihat layaknya kota mati. Denyut rekonstruksi pasca bencana terhilat di sejumlah titik, salah satunya di Kelurahan Mamboro-Kecamatan Palu Utara akhir Februari ini. Di Mamboro ini ada dua unit hunian sementara (huntara), menjadi pemantik optimism korban bencana untuk merajut lagi masa depannya.
2	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Senin, 04 Maret 2019	Kontrak Jalan Tol: BPJT Akan 'Revisi Isi' PPJT	Badan Pengatur Jalan Tol akan memasukkan perhitungan komponen pembiayaan tambahan atas regulasi-regulasi dadakan pemerintah ke dalam perjanjian pengusahaan jalan tol ke depannya. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan bahwa perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yang ada saat ini belum mengatur tentang penghitungan perubahan risiko atas risiko kenegaraan atau risiko politik yang mencuat dan dapat mengurangi ketertarikan investor asing.
3	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Senin, 04 Maret 2019	Berita Foto	Pembangunan Jalan laying Jakarta-Cikampek II (Elevated Toll), di Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini.
4	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Senin, 04 Maret 2019	Jalan Bebas Hambatan: Tol Gratis dan Janji Politis	Wacana penghapusan tarif jalan tol kembali mengemuka, di pantik kabar dari negeri jiran Malaysia. Awal pekan lalu, pemerintahan yang dipimpin oleh koalisi Pakatan Harapan mengumumkan bakal mengambil alih konsesi di empat ruas jalan tol.
5	Bisnis Indonesia (halaman 10)	Sabtu, 02 Maret 2019	KEK Pulau Baai: IPC Siapkan Proposal	PT Pelindo II (Persero) atau IPC berencana mengajukan proposal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Baai di Bengkulu kepada Dewan Nasional KEK pada semester II/2019 setelah melengkapi persyaratan administrasi.
6	Bisnis Indonesia (halaman 10)	Sabtu, 02 Maret 2019	Pengelolaan SDA: Pemerataan Akses Air Bersih Tersendat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) meperkirakan ketersediaan akses air bersih hingga 100% baru dapat terealisasi 5 tahun mendatang. Peningkatan akses diklaim terkendala lantaran kurangnya pendanaan.
7	Kompas (halaman 15)	Sabtu, 02 Maret 2019	Perumahan: Perluasan Subsidi Lebih Detail	Pembahasan tentang perluasan penerima subsidi perumahan perlu lebih detail. Tidak hanya mengenai Batasan penghasilan penerima subsidi, tetapi juga menyangkut harga rumah dan tipe rumah yang bisa dibeli.
8	Kompas (halaman 17)	Sabtu, 02 Maret 2019	Pariwisata: Suramadu Jadi Kawasan Wisata	Kawasan Jembatan Suramadu di pesisir utara Surabaya, Jawa Timur, dikembangkan sebagai tujuan wisata baru dengan daya Tarik kereta gantung. Penambahan destinasi baru ini dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk mencapai target kunjungan 24 juta wisatawan tahun ini.
9	Kompas (halaman 17)	Sabtu, 02 Maret 2019	Asa Baru KEK Pulau Baai	Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Baai di Provinsi Bengkulu diyakini mampu meningkatkan geliat ekonomi daerah. Mobilitas perdagangan akan lebih lancar sehingga peluang ekspor komoditas unggulan terbuka.
10	Kompas (halaman 16)	Senin, 04 Maret 2019	Infrastruktur: Jalan Lintas Selatan Tak Kunjung Tuntas	Jalan lintas selatan atau jalur pantai selatan di Jawa Timur diinisiasi sejak 2001. Namun, infrastruktur penghubung Pacitan, Trenggalek, Tulunggagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi itu belum juga rampung. Jalur itu direncanakan membentang 677,5 kilometer, tetapi baru terealisasi 373,7 km atau 55,2 persen. Dari delapan kabupaten yang dilalui, jalan yang sudah selesai ada di Pacitan sepanjang 87,4 km.
11	Media Indonesia (halaman 4)	Senin, 04 Maret 2019	Membangun Hingga Pelosok Negeri	Dalam empat tahun (2015-2019), pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia serta peningkatan daya saing

				nasional.

Judul	**Penanganan Bencana:** **Rekonstruksi Kebahagiaan Palu**	Tanggal	Senin, 04 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 12)		
Resume	Lima bulan selepas bencana dasyat, rasa pedih masih menggelayuti warga Palu-Donggala-Sigi, Sulawesi Tengah. Namum secara berangsur kondisi Palu saat ini sudah lebih baik, kendati di beberapa lokasi masih terlihat layaknya kota mati. Denyut rekonstruksi pasca bencana terhilat di sejumlah titik, salah satunya di Kelurahan Mamboro-Kecamatan Palu Utara akhir Februari ini. Di Mamboro ini ada dua unit hunian sementara (huntara), menjadi pemantik optimism korban bencana untuk merajut lagi masa depannya.		

PENANGANAN PASCABENCANA

Rekonstruksi Kebahagiaan Palu

redaksi@bisnis.com

Lima bulan selepas bencana dahsyat, rasa pedih masih menggelayuti warga Palu-Donggala-Sigi, Sulawesi Tengah. Namun secara berangsur, kondisi Palu saat ini sudah lebih baik, kendati di beberapa lokasi masih terlihat layaknya kota mati.

Beberapa bangunan tampak tak lagi terurus, bekas-bekas reruntuhan dibiarkan begitu saja tanpa adanya pembenahan. Pemandangan itu banyak terlihat untuk pusat pertokoan, rumah makan, dan hotel.

Keramaian hanya terlihat di kantor-kantor pemerintahan setempat. Aktivitas warga memang telah berangsur pulih, hanya saja bencana yang terjadi September 2018 masih jelas menyisakan jejak kepedihan di Tanah Kaili.

Denyut rekonstruksi pascabencana terlihat di sejumlah titik, salah satunya di Kelurahan Mamboro-Kecamatan Palu Utara akhir Februari lalu. Di Mamboro ini, ada dua unit hunian sementara (huntara), menjadi pemantik optimisme korban bencana untuk merajut lagi masa depannya.

Dengan raut wajah gembira, Sade, 46 tahun, menyatakan kebahagiaan saat menerima bantuan huntara. Maklum, 5 bulan terakhir ia dan keluarga hidup di bawah tenda. "Alhamdulillah, kami tidak lagi di tenda. Anak saya dulu selalu gelisah karena tidurnya hanya beralaskan seadanya," ungkap ibu lima anak ini.

Rumah miliknya telah hilang tersapu tsunami. Ia hanya menemukan puing-puingnya yang bergeser hingga 100 meter dari lokasi awal. Warung tempat mencari nafkah juga habis tersapu bencana.

Hunian yang Sade terima itu adalah bagian dari huntara yang dibangun oleh PT Vale Indonesia Tbk. yang terdiri dari 24 bilik, dilengkapi dengan sejumlah fasilitas standar. Pada masing-masing unit huntara dilengkapi dua toilet umum, dua WC umum, dapur, dan ruang untuk mencuci. Hunian di atas lahan 312 meter persegi itu pun sudah dilengkapi dengan fasilitas listrik.

Presiden Direktur & CEO Vale Indonesia Nico Kanter berharap huntara yang diserahkan itu mampu menjadi penyemangat untuk semua pihak. Tak hanya bagi masyarakat Palu, tetapi juga pihak lain untuk bisa menyalurkan bantuannya kepada para korban bencana.

"Pembangunan huntara ini kami harap bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat khususnya korban bencana yang menerima. Apalagi selama ini mereka hanya tinggal di tenda," ungkap Nico.

Saat seremoni dan penyerahan huntara dari Vale kepada otoritas Palu, senyum sumringah merekah dari wajah-wajah warga penerima manfaat, yang sempat suram sejak 5 bulan lalu karena dirundung duka. Tiga hari pascagempa, Nico bersama tim Vale Indonesia sempat terjun langsung ke lokasi bencana, melihat langsung keadaan Palu yang porak poranda.

Huntara diserahkan kepada 24 kepala keluarga korban bencana oleh Nico bersama dengan Deputy CEO Vale Indonesia Febriany Eddy. Adapun para korban bencana diwakili oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Wakil Wali Kota Palu Sigit 'Pasha' Purnomo.

Selain huntara dan fasilitas pelengkap lainnya, ada pula pembangunan satu unit Puskesmas dibuka untuk layanan kesehatan masyarakat setempat.

Nico menjelaskan, pembangunan huntara tersebut juga berkat dukungan dan kerja sama sejumlah pihak, di antaranya Himpunan Pengusaha Sorowako (Hipso), serta beberapa kontraktor nasional seperti PT Petra Energy, PT Trakindo Utama, PT Truba Engineering, dan PT Coates Hire.

"Secara total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan huntara ini yakni Rp3,36 miliar," papar Nico.

Deputy CEO Vale Indonesia Febriany Eddy mengemukakan bantuan itu merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan yang diberikan perseroan. Sejumlah bantuan juga telah disalurkan terutama pada saat masa tanggap bencana. Bahkan pesawat perusahaan juga dipakai untuk proses penyaluran bantuan.

Untuk selanjutnya, pihaknya berkomitmen akan terus melakukan pendataan kebutuhan korban bencana, berpartisipasi dalam memberikan program air bersih yang dinilai merupakan kebutuhan dasar dan berkesinambungan.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyampaikan apresiasinya kepada Vale Indonesia karena sejak masa tanggap, perusahaan pengolah nikel itu telah memberi banyak manfaat untuk pemulihan Palu.

"Sesuai dengan *master plan*, ini betul-betul termasuk huntara yang layak. Penyerahannya pun kami harap tepat sasaran bagi korban yang paling membutuhkan tempat tinggal," kata Longki.

Secara umum, Palu masih membutuhkan banyak bantuan dari seluruh pihak, tidak hanya bersumber dari pemerintah. Gempa berkekuatan 7,4 skala *richter* disusul tsunami serta fenomena likuifaksi mengakibatkan kerusakan luar biasa dan korban jiwa yang teramat besar.

Akibat bencana itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 2.000 korban meninggal dunia dan puluhan ribu warga kehilangan tempat tempat tinggal. Yang jelas, untuk kembali memulihkan Palu butuh waktu dan keterlibatan aktif banyak pihak. (k36)

Judul	**Kontrak Jalan Tol: BPJT Akan 'Revisi Isi' PPJT**	Tanggal	Senin, 04 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Badan Pengatur Jalan Tol akan memasukkan perhitungan komponen pembiayaan tambahan atas regulasi-regulasi dadakan pemerintah ke dalam perjanjian pengusahaan jalan tol ke depannya. Kepala Badan Pengatu Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan bahwa perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yang ada saat ini belum mengatur tentang penghitungan perubahan risiko atas risiko kenegaraan atau risiko politik yang mencuat dan dapat mengurangi ketertarikan investor asing.		

▸ KONTRAK JALAN TOL

BPJT Akan 'Revisi Isi' PPJT

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengatur Jalan Tol akan memasukkan penghitungan komponen pembiayaan tambahan atas regulasi-regulasi dadakan pemerintah ke dalam perjanjian pengusahaan jalan tol ke depannya.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan bahwa perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yang ada saat ini belum mengatur tentang penghitungan perubahan risiko atas risiko kenegaraan atau risiko politik yang mencuat dan dapat mengurangi ketertarikan investor asing.

Menurut catatan *Bisnis*, saat ini hanya ada satu BUJT yang mayoritasnya sahamnya dimiliki asing yakni PT Lintas Marga Sedaya (LSM), setelah dahulu beberapa investor sempat mencuat seperti MTD Capital dan Thiess.

Danang menilai bahwa tidak hanya investor yang berinvestasi dalam bentuk konsorsium, tetapi kecenderungan pergerakan kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan terbuka juga memiliki perubahan yakni kepemilikan asing semakin berkurang.

Perubahan ini bisa menjadi positif dan negatif. Hal yang positif adalah investor-investor di dalam negeri sudah memiliki kemampuan untuk bisa melakukan pembangunan dan berinvestasi di jalan tol. Adapun, sisi negatifnya adalah berkurangnya kepercayaan investor internasional.

"Saya kira kalau bicara investor internasional, salah satu yang mengemuka adalah soal cukup banyak perubahan-perubahan kebijakan kita. Di dalam PPJT ke depan harus diikutsertakan," tuturnya menjawab pertanyaan *Bisnis*, Jumat (1/3).

Danang menilai bahwa investor asing tidak akrab dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang sering diputuskan secara mendadak, semisal, penggratisan tarif jalan tol selama seminggu dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. "Ke depannya [hal semacam ini] akan dimasukkan ke dalam penghitungan finansial."

KONSISTENSI

Berbeda pendapat dengan Danang, Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono mengatakan bahwa perhitungan ini tidak perlu dimasukkan ke dalam PPJT karena yang dibutuhkan adalah konsistensi semua pihak untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam PPJT. "Kalau, menurut saya, adanya konsistensi dan penghargaan dari masing masing pihak untuk meng-*honor* butir butir kesepakatan yang sudah dibuat bersama adalah lebih penting bagi kepastian berusaha dan jaminan terhadap risiko politik daripada mengubah-ubah PPJT yang sudah baik ini," ujarnya kepada *Bisnis*, Minggu (3/3).

Krist menilai bahwa kalaupun pemerintah memerlukan suatu kebijakan untuk memberi insentif tertentu, yang harus dipenuhi adalah kompensasi atas dampak dari kebijakan pemerintah tersebut.

Risiko politik yang menyangkut pembebasan tanah dan penetapan tarif diambil oleh pemerintah, sedangkan risiko bisnis karena proyeksi trafik dan pengelolaan operasi dan pemeliharaan didorong ke pelaku usaha. Untuk memberi jaminan atas risiko politik tersebut. ***(Krizia P. Kinanti)***

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Senin, 04 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Pembangunan Jalan laying Jakarta-Cikampek II (Elevated Toll), di Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini.		

BELUM DAPAT DIGUNAKAN

Antara/Risky Andrianto

Pekerja menyelesaikan pembangunan Jalan Tol layang Jakarta–Cikampek II (Elevated Toll), di Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini. Elevated toll atau tol layang Jakarta–Cikampek diprediksi belum dapat digunakan pada mudik Lebaran tahun ini. Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyangsikan tol tersebut dapat selesai tepat waktu. Menurut dia, progres hingga saat ini baru sekitar 70%, sementara mudik Lebaran kurang dari 90 hari lagi. Dengan asumsi rata-rata progres mingguan 1%, maka dalam 1 bulan progres hanya sebesar 4%, perlu waktu sekitar 8 bulan penyelesaian lagi sejak Maret 2019.

Judul	**Jalan Bebas Hambatan: Tol Gratis dan Janji Politis**	Tanggal	Senin, 04 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Wacana penghapusan tarif jalan tol kembali mengemuka, di pantik kabar dari negeri jiran Malaysia. Awal pekan lalu, pemerintahan yang dipimpin oleh koalisi Pakatan Harapan mengumumkan bakal mengambil alih konsesi di empat ruas jalan tol.		

▸ JALAN BEBAS HAMBATAN

Tol Gratis dan Janji Politis

Wacana penghapusan tarif jalan tol kembali mengemuka, dipantik kabar dari negeri jiran Malaysia. Awal pekan lalu, pemerintahan yang dipimpin oleh koalisi Pakatan Harapan mengumumkan bakal mengambil alih konsesi di empat ruas jalan tol.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Penghapusan tarif jalan tol merupakan satu dari seratus janji atau manifesto politik Pakatan Harapan (PH) saat pemilu ke-14 (PRU14) pada 2018. PH merebut 123 kursi di parlemen baru, jumlah yang cukup untuk membentuk pemerintahan baru.

Meski upaya penghapusan tarif jalan tol terjadi dalam belantika politik Malaysia, kebijakan serupa bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia. Terlebih, janji untuk meniadakan tarif tol sempat dilontarkan calon wakil presiden nomor urut dua, Sandiaga Uno.

Bukan juga sebuah kemustahilan, bila petahana menang, jalan tol lain akan diubah menjadi bukan tol, seperti yang terjadi pada Oktober 2018 saat tarif

▸ **Berdasarkan PP No. 30/2017, konsesi bisa dilanjutkan dengan tiga pertimbangan.**

jembatan tol Suramadu dihapuskan.

Di Malaysia, ide untuk menghapus tarif tol sudah jauh-jauh hari dijanjikan. Setidaknya, sejak 2015 PH melansir bakal menghapus tarif tol di koridor North South Expressway (NSE), koridor jalan tol terpanjang (823 kilometer) yang dikelola oleh PLUS Berhad. PLUS disebut sudah untung karena biaya pembangunan jalan tol sudah melewati titik impas.

Hampir 4 tahun berselang, PH berniat menunaikan janjinya. Awal pekan lalu, Pemerintah Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Gamuda Berhad untuk mengambil alih konsesi di empat ruas, yaitu Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), Lebuhraya Shah Alam (KESAS) and SMART Tunnel.

Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan bahwa pengambilalihan konsesi tidak akan merugikan Gamuda selaku pemegang konsesi. Dia bahkan menyebut *triple win-win solution*.

Mantan Perdana Menteri Malaysia yang kini berada di kubu oposisi, Najib Razak mencibir rencana PH. Dalam akun twitter resmi miliknya, Najib menyebutkan bahwa penerapan biaya kemacetan justru tidak sesuai dengan manifesto PH. "Rupanya tol hanya *free* semasa kita tidur yaitu dari pukul 11 malam sampai 5 pagi," cuitnya.

Di Indonesia, jalan tol juga mendapat perhatian luas, baik dari pemerintah maupun dari kubu oposisi. Presiden Joko Widodo sejak 2015 menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, salah satunya jalan tol. Pencapaian pemerintahan Joko Widodo & Jusuf Kalla tak bisa dipandang remeh.

Pada akhir 2018, jalan tol Trans-Jawa akhirnya tersambung sejauh 933 km, dari Merak hingga Pasuruan. Pembangunan jalan tol baru dalam 4 tahun (2015—2018) mencapai 782 km, hampir menyamai panjang jalan tol yang dibangun selama 36 tahun sepanjang 784 kilometer. Pada 2019, 23 ruas siap beroperasi dengan panjang keseluruhan 816 kilometer.

TIDAK MUSTAHIL

Penghapusan tarif tol memang bukan hal mustahil. Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pernah menyampaikan bahwa negara punya kewenangan untuk menentukan status jalan tol setelah konsesi berakhir. Berdasarkan PP No. 30/2017, konsesi bisa dilanjutkan dengan tiga pertimbangan.

"Kalau ditanya memungkinkan, ya mungkin, boleh digratiskan tergantung pemerintahnya. Lihat aja mana yang mau selesai [konsesi], *enggak* masalah," jelasnya.

Dengan kata lain, bola sepenuhnya berada di tangan pemerintah, entah itu kubu petahana yang berhasil mempertahankan kekuasaan atau kubu oposisi yang mengambil alih tampuk pemerintahan. Tentu saja, pemilihan umum pada 17 April 2019 akan menjadi penentu.

Siapapun yang akan keluar sebagai pemenang pada pemilu nanti, berjanji untuk melenyapkan tarif tol perlu memperhatikan beberapa pertimbangan, terutama soal keuangan.

Penghapusan tarif tol bakal membuat biaya perawatan menjadi tanggungan negara karena status jalan berubah menjadi jalan bukan tol. Tentu saja, tidak ada istilah jalan tol gratis karena "tol" dan "gratis" adalah *contradicto in terminis*.

Pemerintah bisa menyortir ruas-ruas uzur yang masa konsesinya akan berakhir dalam waktu dekat agar tak perlu mengeluarkan kocek untuk kompensasi. Namun, menunggu konsesi berakhir sepertinya perlu kesabaran ekstra.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol, hanya dua ruas, yakni tol Wiyoto—Wiyono (2025) dan Pondok Aren—Serpong (2028) yang akan berakhi kurang dari 10 tahun.

Opsi lain, pemerintah bisa meniru cara yang dilakukan PH di Malaysia, tetapi perlu modal besar untuk kompensasi karena nilai hak pengusahaan 55 jalan tol di Indonesia—berdasarkan laporan keuangan emiten di Bursa Efek Indonesia— mencapai Rp141 triliun.

Kalangan operator jalan tol menilai bahwa pemerintah punya kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan di industri jalan tol. Namun, apapun kebijakan yang diambil, pemerintah harus memberikan solusi yang adil.

Sekretaris Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono mengatakan pembebasan tarif jalan tol sebelum masa konsesi berakhir akan bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah. Dia menilai, upaya yang dilakukan pemerintah Malaysia juga bisa menjadi rujukan yang memadai.

"Ini *benchmark* yang cukup bagus dan ini sangat bergantung kemampuan pemerintah untuk mengkompensasi investasi yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak dalam industri jalan tol," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto tidak yakin pemerintah hendak menghapuskan tarif tol. Dia beralasan bahwa pemerintah perlu memberi kompensasi yang tidak sedikit bila berkeinginan mengambil alih konsesi jalan tol milik BUJT.

Di samping itu, dia merujuk pada pemberian kompensasi atas kebijakan nasionalisasi tarif yang saat ini belum jelas. "Kalaupun uangnya ada, lebih baik pemerintah membangun jalan di tempat lain, di Sumatra, Sulawesi, Papua. Buat apa membeli konsesi tol di dalam kota?" katanya. ■

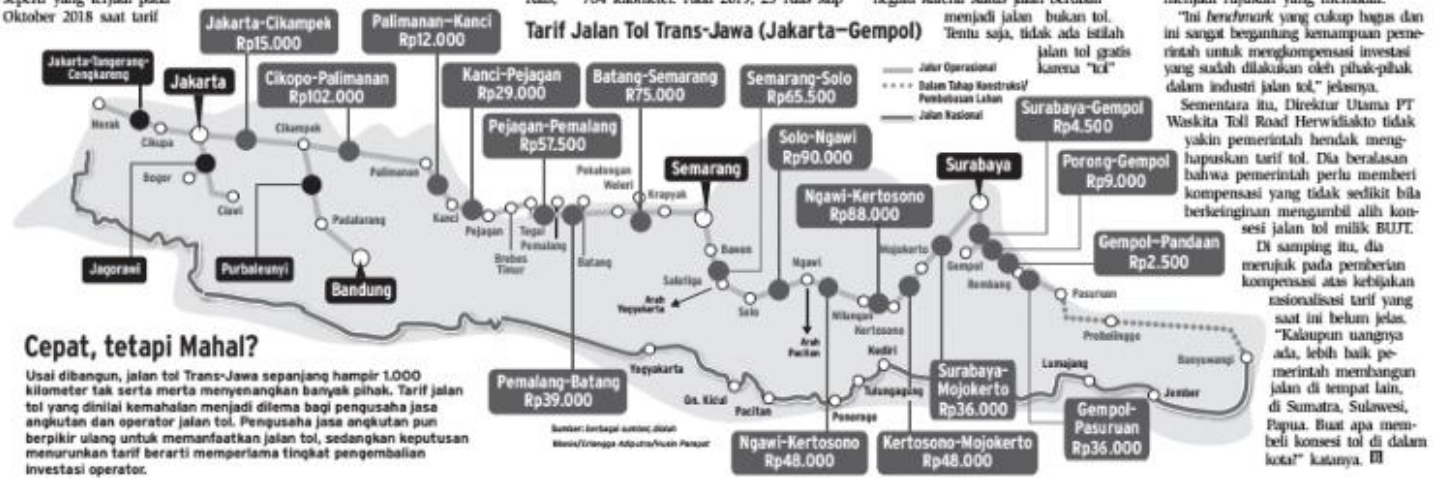

Cepat, tetapi Mahal?

Usai dibangun, jalan tol Trans-Jawa sepanjang hampir 1.000 kilometer tak serta merta menyenangkan banyak pihak. Tarif jalan tol yang dinilai kemahalan menjadi dilema bagi pengusaha jasa angkutan dan operator jalan tol. Pengusaha jasa angkutan pun berpikir ulang untuk memanfaatkan jalan tol, sedangkan keputusan menurunkan tarif berarti memperlama tingkat pengembalian investasi operator.

Judul	**KEK Pulau Baai: IPC Siapkan Proposal**	Tanggal	Sabtu, 02 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 10)		
Resume	PT Pelindo II (Persero) atau IPC berencana mengajukan proposal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Baai di Bengkulu kepada Dewan Nasional KEK pada semester II/2019 setelah melengkapi persyaratan administrasi.		

KEK PULAU BAAI

IPC Siapkan Proposal

Bisnis, JAKARTA — PT Pelindo II (Persero) atau IPC berencana mengajukan proposal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Baai di Bengkulu kepada Dewan Nasional KEK pada semester II/2019 setelah melengkapi persyaratan administratif.

Direktur Operasi Pelindo II Prasetyadi mengatakan rencana induk Pelabuhan Pulau Baai, termasuk rencana pengembangan fasilitas daratan tahap jangka panjang, sudah disetujui Kementerian Perhubungan.

IPC kini terus berkoordinasi dengan Pemprov Bengkulu secara intensif. Sebagai bagian proses pengusulan kepada Dewan Nasional KEK, perseroan akan menggelar *focus group discussion* di Bumi Rafflesia pada Senin (4/3) bersama pemda dan investor.

Setelah itu, Pelindo II selaku pengusul akan melengkapi persyaratan administrasi, seperti studi kelayakan, rencana bisnis (*business plan*), *master-plan*, dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

"[Pengajuan usulan] paling lambat semester II/2019. Studi butuh waktu, Amdal juga, paling tidak 3-4 bulan, belum lagi izin ke KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]," katanya seusai diskusi bertema *KEK Pulau Baai Bengkulu sebagai Penggerak Ekonomi Kawasan Barat Pulau Sumatra*, Jumat (1/3).

Dia mengemukakan lokasi calon KEK Pulau Baai unggul karena tepat di belakang pelabuhan. Kondisi ini berbeda dengan KEK Sei Mangkei dan KEK Palu yang berjarak dengan pelabuhan.

Mengenai kegiatan utama, KEK Pulau Baai seluas 408 hektare akan diarahkan untuk aktivitas penghiliran komoditas andalan Bengkulu, seperti kelapa sawit, kopi, dan karet.

Selama ini, kata Prasetyadi, komoditas Bengkulu dibawa ke Pelabuhan Panjang, di Lampung, kemudian diolah dan dikapalkan ke luar negeri melalui pelabuhan itu sehingga dicatat sebagai ekspor Provinsi Lampung.

Dari sisi infrastruktur pelabuhan, Pelindo II menyatakan siap karena saat ini sedang melakukan pengembangan dermaga curah kering, dermaga curah cair, dan terminal peti kemas, serta digitalisasi. Fasilitas pembangkit listrik berkapasitas 2x100 megawatt juga tengah dibangun.

Pelindo merancang klasterisasi di dalam KEK. Kawasan akan dibagi menjadi zona inti 1 (industri pengolahan hasil tambang dan agroindustri), zona inti 2 (*packaging*, pergudangan, *freight forwarding*), dan zona industri pendukung vital (PLTU, industri pengolahan air, pengolahan bahan bakar, pengolahan air limbah, pengolahan sampah).

"Namun, ini perlu peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten karena KEK ini tidak berarti kalau tidak ada isinya," kata Prasetyadi.

Pelindo II juga berharap pemda tidak mempersulit perizinan yang diajukan calon investor sehingga pelaku usaha tertarik masuk ke KEK.

Pelindo II menyiapkan dana Rp500 miliar untuk pengembangan tahap awal KEK. BUMN operator pelabuhan itu sejauh ini belum memutuskan menggandeng pihak lain untuk membangun kawasan.

Kendati demikian, perseroan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan investor lain. Prasetyadi mengatakan prospek KEK juga cerah sejalan dengan rencana kereta api trase Kota Padang-Pulau Baai sebagai kelanjutan trase Muara Enim-Kota Padang. **(Sri Mas Sari)**

Judul	**Pengelolaan SDA: Pemerataan Akses Air Bersih Tersendat**	Tanggal	Sabtu, 02 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 10)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) meperkirakan ketersediaan akses air bersih hingga 100% baru dapat terealisasi 5 tahun mendatang. Peningkatan akses diklaim terkendala lantaran kurangnya pendanaan.		

▸ PENGELOLAAN SDA

Pemerataan Akses Air Bersih Tersendat

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan ketersediaan akses air bersih hingga 100% baru dapat terealisasi 5 tahun mendatang. Peningkatan akses diklaim terkendala lantaran kurangnya pendanaan.

Krizia Putri Kinanti
krizia.putri@bisnis.com

Menurut Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2015-2019, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya ditargetkan dapat menyelesaikan target akses air bersih hingga 100%. Namun, kenyataannya hingga 2018 capaian akses air bersih baru mencapai 73,6%.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga memperkirakan sisa target baru dapat dicapai pada 5 tahun mendatang lantaran pada tahun ini pihaknya hanya menargetkan realisasi 76%.

"Sampai 2018 akses kita 72% lebih. Sampai dengan 2019 diperkirakan akses air bersih 76%-77%. Kita masih punya pekerjaan rumah 23%, bisa *enggak*? Mudah-mudahan bisa kita capai 5 tahun ke depan," katanya di Jakarta, Jumat (1/3).

Menuru Danis, dengan kebutuhan investasi akses air bersih sekitar Rp250 triliun, kendala yang dihadapi adalah masalah pendanaan yang tidak bisa mengandalkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, perlu ada pengembangan-pengembangan pendanaan lebih lanjut agar target dapat tercapai.

"*Iya*, [butuh] Rp250 triliun, makanya kita harus meningkatkan sumber pembiayaan apakah dari pemerintah, pemerintah daerah, dari swasta, dari dana lain yang memungkinkan karena APBN saja *enggak* bisa," ujarnya.

Pihaknya juga akan meningkatkan efektivitas pengelolaan salah satu contohnya adalah peningkatan efektivitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) meskipun sudah dilakukan penghapusan utang atau pemutihan. "Sudah diputihkan tahun lalu, kan tetap saja harus ditingkatkan kinerjanya sama sama BPKP [Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan]."

Pemutihan sebelumnya dilakukan agar PDAM dapat memperbaiki kapasitas di seluruh Indonesia dalam mendistribusikan air.

Pihaknya juga terus mendorong Program 100-0-100 menuju pemenuhan target tiga sektor yakni pemenuhan 100% akses air layak minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0%, dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak.

▸ Sampai dengan 2019 diperkirakan akses air bersih baru mencapai 76%–77%.

▸ Selama 5 tahun terakhir peningkatan akses air minum sekitar 4,5% per tahun.

STRATEGI BARU

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan selama 5 tahun terakhir peningkatan akses air minum sekitar 4,5% per tahun. Menurutnya, penting untuk menerapkan strategi lompatan dalam mewujudkan target capaian 100% layanan akses air layak minum. Peran BUMN pun dinilai penting.

Basuki berharap program ini bisa turut mendukung penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Sumber Daya Air. Dia mengatakan keterlibatan semua pihak dalam masa pembahasan RUU SDA sangat penting agar dihasilkan regulasi pengelolaan SDA terpadu yang lebih baik dari sebelumnya.

"UU SDA ini untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pemerintah menjamin penguasaan sumber daya air bagi kepentingan masyarakat banyak. Tetapi untuk air minum bisa diusahakan oleh BUMN atau BUMD yang dapat bekerja sama dengan swasta," ujar Basuki.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga telah membuat Program Strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dengan membangun beberapa Sistem Penyedian Air Minum (SPAM), yaitu SPAM Regional, SPAM Kawasan Perkotaan, SPAM Kawasan Khusus, SPAM Kawasan Rawan Air, dan SPAM berbasis masyarakat.

Pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA) Syarkawi Rauf mengatakan pemerintah dan swasta tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi mesti berbagi peran dalam mengelola penyedian air bersih yang merupakan layanan dasar masyarakat.

Judul	**Perumahan: Perluasan Subsidi Lebih Detail**	Tanggal	Sabtu, 02 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 13)		
Resume	Pembahasan tentang perluasan penerima subsidi perumahan perlu lebih detail. Tidak hanya mengenai Batasan penghasilan penerima subsidi, tetapi juga menyangkut harga rumah dan tipe rumah yang bisa dibeli.		

PERUMAHAN

Perluasan Subsidi Lebih Detail

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan tentang perluasan penerima subsidi perumahan perlu lebih detail. Tidak hanya mengenai batasan penghasilan penerima subsidi, tetapi juga menyangkut harga rumah dan tipe rumah yang bisa dibeli.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Jumat (1/3/2019), menyampaikan, batasan penghasilan pembeli rumah subsidi dari Rp 4 juta menjadi Rp 8 juta hanya untuk rumah tapak bersubsidi. Pemerintah belum menentukan hal lain, seperti batasan penghasilan untuk pembeli rumah susun sederhana milik yang saat ini Rp 7 juta per bulan.

"Untuk batas penghasilan dari maksimal Rp 4 juta menjadi Rp 8 juta sudah disepakati. Akan tetapi, yang lain, seperti subsidi bantuan uang muka (SBUM), jumlah kredit maksimum yang bisa diambil, dan lalu ukuran rumah, perlu didetailkan lagi," kata Basuki.

Kriteria yang sudah disepakati terkait penerima subsidi perumahan dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI dan Polri. Selain batasan penghasilan dinaikkan menjadi Rp 8 juta, ukuran rumah yang bisa dibeli dinaikkan dari maksimal 36 meter persegi (m^2) menjadi 72 m^2.

Selain itu, lanjut Basuki, jumlah kredit pemilikan rumah (KPR) yang bisa diambil ASN serta anggota TNI dan Polri maksimal Rp 300 juta. Dengan demikian, mereka bisa merenovasi rumah.

Akan tetapi, menurut Basuki, pemerintah tidak hanya memikirkan skema pembiayaan bagi ASN serta anggota TNI dan Polri. Sebab, perluasan penerima subsidi perumahan juga ditujukan bagi masyarakat umum atau masyarakat berpenghasilan rendah.

Basuki memastikan pembahasan terkait detail perluasan subsidi perumahan tuntas pekan ini. Hasilnya dilaporkan kepada Wakil Presiden agar dibuat payung aturannya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Totok Lusida mengatakan, salah satu topik pembahasan REI dengan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Selama ini, rumah subsidi tidak dikenai PPn, sementara REI mengusulkan PPn hanya dikenakan sebagian.

"Regulasi hanya bisa mengakomodasi bebas PPn atau dikenai PPn. Lalu, disepakati rumah yang dibeli dibebaskan dari PPn," kata Totok. (NAD)

Judul	**Pariwisata: Suramadu Jadi Kawasan Wisata**	Tanggal	Sabtu, 02 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 17)		
Resume	Kawasan Jembatan Suramadu di pesisir utara Surabaya, Jawa Timur, dikembangkan sebagai tujuan wisata baru dengan daya Tarik kereta gantung. Penambahan destinasi baru ini dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk mencapai target kunjungan 24 juta wisatawan tahun ini.		

PARIWISATA

Suramadu Jadi Kawasan Wisata

SURABAYA, KOMPAS — Kawasan Jembatan Suramadu di pesisir utara Surabaya, Jawa Timur, dikembangkan sebagai tujuan wisata baru dengan daya tarik kereta gantung. Penambahan destinasi baru ini dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk mencapai target kunjungan 24 juta wisatawan tahun ini.

"Rencananya akan dibuka saat ulang tahun Kota Surabaya," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Jumat (1/3/2019), seusai "Bersih-Bersih Sampah" di kaki Jembatan Suramadu. Peringatan hari jadi Surabaya dilakukan pada 31 Mei 2019.

Pembangunan kereta gantung merupakan bagian dari pengembangan di daerah penghubung Surabaya-Madura untuk menjadi kawasan wisata. Proyek dikerjakan sejak tahun lalu.

Kereta gantung ini memiliki jalur sepanjang 725 meter dengan ketinggian 25 meter, melintasi Jembatan Suramadu hingga Jembatan Suroboyo. Ada 20 kereta gantung yang disiapkan dengan kapasitas masing-masing enam orang. Wahana anyar ini dibangun PT PP Properti Suramadu menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai destinasi wisata baru, kereta gantung akan ditunjang berbagai fasilitas, salah satunya sentra bagi pedagang kaki lima. Warga sekitar yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan akan diprioritaskan ikut serta.

"Kalau Senin-Jumat, bekerja sebagai nelayan. Akhir pekan menjadi pelaku wisata," kata Risma.

Perahu-perahu nelayan di sekitar Jembatan Suramadu juga akan dicat aneka warna. Hal itu bakal menarik minat anak milenial penghobi fotografi.

"Kemudahan akses juga akan diperhatikan. Jalan menuju Suramadu akan lebih mudah karena akan dihubungkan dengan Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya," kata Risma.

Bersihkan sampah

Risma menambahkan, potensi wisata di pesisir utara Surabaya itu cukup menjanjikan. Ada Jembatan Suroboyo di kawasan Bulak, sekitar 2 kilometer arah timur Jembatan Suramadu. Destinasi ini mampu menarik wisatawan karena ditata dengan baik dan bebas dari sampah.

"Dahulu, kawasan Bulak kotor penuh sampah. Sekarang bersih dan membuat wisatawan betah menikmati. Kalau tempatnya kotor, siapa yang mau berkunjung?" katanya.

Oleh karena itu, dia meminta warga dan nelayan untuk aktif menjaga kebersihan. Akan tidak efektif jika destinasi wisata yang sudah dibangun lantas sepi pengunjung hanya karena penuh sampah.

Kepedulian masyarakat terlihat dalam kegiatan bersih-bersih sampah di sekitar Suramadu memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Jumat pagi. Sebanyak 14,6 ton sampah dipungut sekitar 10.000 warga selama tiga jam. Sampah yang ditemukan mayoritas berupa sampah plastik dan kertas.

Rohimin (50), nelayan setempat, berharap, kehidupannya bisa lebih sejahtera jika menjadi bagian dari pelaku wisata. Istrinya nanti bisa berjualan guna menambah penghasilan dari melaut yang sering tidak menentu. "Biasanya Rp 100.000 per hari. Namun, sekarang turun akibat cuaca buruk," ujarnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Antiek Sugiharti berharap, bertambahnya destinasi wisata mampu mendongkrak kunjungan wisatawan. Tahun ini, pihaknya menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 24 juta orang. Tahun lalu, ada 20 juta wisatawan datang ke Kota Surabaya. (SYA)

Judul	**Asa Baru KEK Pulau Baai**	Tanggal	Sabtu, 02 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 17)		
Resume	Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Baai di Provinsi Bengkulu diyakini mampu meningkatkan geliat ekonomi daerah. Mobilitas perdagangan akan lebih lancar sehingga peluang ekspor komoditas unggulan terbuka.		

Asa Baru KEK Pulau Baai

Pemerintah Provinsi Bengkulu dan PT Pelindo II berkomitmen untuk segera mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Baai.

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Baai di Provinsi Bengkulu diyakini mampu meningkatkan geliat ekonomi daerah. Mobilitas perdagangan akan lebih lancar sehingga peluang ekspor komoditas unggulan terbuka.

Meski demikian, pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) memerlukan dukungan komitmen pemerintah daerah, kesiapan infrastruktur, dan ketersediaan tenaga kerja.

Hal itu mengemuka dalam dialog Teras Kita bertema "KEK Pulau Baai Bengkulu sebagai Penggerak Ekonomi Kawasan Barat Pulau Sumatera", yang diselenggarakan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama), harian *Kompas*, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia, Bank Bengkulu, dan PT Pelabuhan Indonesia II, di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Acara dihadiri Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Kepala Departemen Regional I BI Suhaedi, Ketua Bidang Kajian dan Iptek PP Kagama Haryadi Himawan, dan Redaktur Pelaksana Harian *Kompas* Adi Prinantyo.

Hadir sebagai narasumber Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bengkulu Endang Kurnia Saputra, Direktur Operasi PT Pelindo II Prasetyadi, dan Rektor Universitas Bengkulu Ridwan Nurazi.

Enoh menuturkan, pembangunan KEK diprioritaskan untuk wilayah luar Jawa. Tujuannya mengatasi persoalan ketimpangan antarwilayah karena sekitar 58 persen perekonomian nasional masih terkonsentrasi di Jawa. Sejauh ini, pemerintah sudah menetapkan 12 KEK dengan rincian 6 KEK sudah beroperasi dan 6 KEK sedang dibangun.

Berdasarkan data Dewan Nasional KEK per Januari 2019, total komitmen investasi di 12 KEK itu mencapai Rp 104,76 triliun. Komitmen investasi terbesar di KEK Galang Batang Rp 36,25 triliun, KEK Mandalika Rp 19,89 triliun, dan KEK Tanjung Api-api Rp 13,42 triliun. Adapun realisasi tenaga kerja di semua KEK 10.700 orang.

Dari 12 KEK yang ditetapkan pemerintah, menurut Enoh, ada 5 KEK yang terletak di wilayah Pulau Sumatera. Namun, kelima KEK itu berada di bagian timur. "KEK perlu ada di bagian barat Pulau Sumatera. Untuk itu, butuh kajian lebih lanjut, termasuk komitmen pemerintah daerah dan usulan industri atau komoditas unggulan," kata Enoh.

Salah satu KEK yang diusulkan ada di barat Sumatera adalah kawasan Pulau Baai, Bengkulu. Menurut Enoh, kawasan

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Dialog Teras Kita yang diselenggarakan harian *Kompas*, PP Kagama, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia, Bank Bengkulu, dan PT Pelindo II, di Jakarta, Jumat (1/3/2019), membahas "KEK Pulau Baai Bengkulu sebagai Penggerak Ekonomi Kawasan Barat Pulau Sumatera". Hadir sebagai pembicara (dari kiri ke kanan) Kepala Perwakilan BI Bengkulu Endang Kurnia Saputra, Direktur Operasi PT Pelindo II Prasetyadi, Rektor Universitas Bengkulu Ridwan Nurazi, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Enoh Suharto Pranoto, dan moderator Wakil Kepala Desk Nusantara *Kompas* C Wahyu Haryo PS.

KTERASKITA

Pulau Baai dapat diusulkan masuk KEK prioritas pemerintah karena lokasinya cukup strategis. Namun, pemerintah daerah masih harus menentukan industri atau komoditas yang akan menjadi prioritas ekspor.

Rohidin mengatakan, Bengkulu memiliki enam komoditas unggulan, yaitu kopi, batubara, minyak sawit, karet, perikanan, dan panas bumi. Peluang ekspor keenam komoditas unggulan itu cukup besar karena lokasi geografis Bengkulu yang strategis, yakni berbatasan dengan empat provinsi besar di barat Sumatera dan menghadap Samudra Hindia.

"Kawasan Pulau Baai bisa menjadi gerbang ekspor ke Afrika dan India. Saat ini sudah ada 6-7 investor yang masuk untuk mengembangkan KEK Pulau Baai," ujar Rohidin.

Investasi di kawasan Pulau Baai, menurut dia, antara lain pembangkit tenaga listrik 2x100 megawatt, pengepakan Semen Padang, termasuk industri kawasan pergudangan, pembangunan terminal cair seluas 40 hektar hingga 50 hektar, dan instalasi karantina hewan nasional. Untuk kemudahan berusaha, pemerintah sudah menerapkan sistem perizinan terintegrasi berbasis daring.

Dampak ekonomi

Dampak ekonomi yang ditimbulkan jika kawasan Pulau Baai ditetapkan sebagai KEK cukup besar. Endang mengatakan, dari kajian BI, perekonomian Bengkulu bisa tumbuh 0,67 persen dalam 2-3 tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada 2018 sebesar 4,99 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi terjadi karena mobilitas perdagangan semakin besar.

"Arus ekspor-impor barang ke empat provinsi di sekitar Bengkulu akan melalui kawasan Pulau Baai," katanya.

Pintu masuk ekspor nasional juga semakin terbuka karena kawasan Pulau Baai, dinilai strategis sebagai alur perdagangan internasional, antara lain dari dan ke India, Sri Lanka, Afrika Barat, dan Timur Tengah. Biaya logistik untuk ekspor akan lebih efisien karena lokasi pengiriman lebih dekat ketimbang dari Jawa.

Menurut Endang, pembangunan KEK secara bertahap akan mengubah struktur perekonomian nasional yang terkonsentrasi di Jawa. Pusat-pusat ekonomi di luar Jawa akan mendorong migrasi tenaga kerja terampil sehingga menggeliatkan ekonomi daerah.

"Bengkulu ini kecil dan sering kali tidak dilirik, padahal sangat prospektif," katanya.

Prasetyadi menambahkan, selama ini sebagian besar komoditas asal Bengkulu diekspor dari Lampung, seperti kopi dan karet. Kondisi itu membuat sumbangan ekspor terhadap pendapatan asli daerah relatif kecil. Harapannya, penetapan KEK Pulau Baai mengatasi persoalan itu karena kawasan industri berada dekat pelabuhan.

Ridwan menilai, penetapan KEK mesti dibarengi studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan yang komprehensif. Hal itu diperlukan agar risiko akibat konflik sosial atau bencana alam saat KEK beroperasi dapat ditekan. Penyusunan dokumen pengusulan juga membutuhkan waktu sehingga memerlukan kerja sama dan keseriusan berbagai pemangku kebijakan. (KRN)

Judul	**Infrastruktur: Jalan Lintas Selatan Tak Kunjung Tuntas**	Tanggal	Senin, 04 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 16)		
Resume	Jalan lintas selatan atau jalur pantai selatan di Jawa Timur diinisiasi sejak 2001. Namun, infrastruktur penghubung Pacitan, Trenggalek, Tulunggagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi itu belum juga rampung. Jalur itu direncanakan membentang 677,5 kilometer, tetapi baru terealisasi 373,7 km atau 55,2 persen. Dari delapan kabupaten yang dilalui, jalan yang sudah selesai ada di Pacitan sepanjang 87,4 km.		

INFRASTRUKTUR

Jalan Lintas Selatan Tak Kunjung Tuntas

SURABAYA, KOMPAS — Jalan lintas selatan atau jalur pantai selatan di Jawa Timur diinisiasi sejak 2002. Namun, infrastruktur penghubung Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi itu belum juga rampung.

Jalur itu direncanakan membentang 677,5 kilometer, tetapi baru terealisasi 373,7 km atau 55,2 persen. Dari delapan kabupaten yang dilalui, jalan yang sudah selesai ada di Pacitan sepanjang 87,4 km.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Minggu (3/3/2019), menegaskan, pembangunan jalan lintas selatan (JLS) penting bagi provinsi berpenduduk 40 juta jiwa itu. Keberadaannya diyakini mendorong perkembangan kawasan selatan setara kawasan jalur pantai utara (pantura).

Jalur pantura Jawa, termasuk di Jatim, pengembangan dari jaringan jalan raya pos peninggalan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pada abad ke-19.

Sebelum ada JLS, pembangunan di Jatim terkonsentrasi di kawasan utara dan tengah. Padahal, potensi pesisir selatan Jatim amat hebat, terutama perikanan dan pariwisata.

"JLS harus diteruskan karena turut menjadi janji politik kami dalam Nawa Bhakti Satya, terutama Bhakti 4 Jatim Akses," kata Emil.

Saat ini sudah ada komitmen pendanaan dari Islamic Development Bank untuk menyelesaikan beberapa segmen jalur pantai selatan. Emil dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berjanji mewujudkan JLS dalam masa pemerintahan mereka yang dilantik pada 13 Februari 2019.

Pemerintah kabupaten akan didorong mempercepat pembahasan rute JLS. Sejak 2002, masalah penetapan rute jadi kendala karena ada lahan konservasi dan komersial yang dikuasai lembaga negara, seperti Perum Perhutani, sehingga pemerintah daerah harus mencari lahan pengganti.

Bupati Pacitan Indartato mengatakan, keberadaan JLS amat menopang kemajuan "Bumi 1001 Goa" itu, terutama dalam sektor pariwisata bahari. Hubungan dengan Trenggalek dan Wonogiri (Jateng) pun meningkat.

Selain itu, JLS membuka keterisolasian daerah. Pesona pesisir selatan di Pacitan, antara lain Pantai Soge, Pantai Tawang, Pantai Wonocaki, Pantai Ndelik, Pantai Kunir, Sun Beach, Star Beach, dan Pantai Daki, mulai diketahui dan dikenal, yang berdampak ekonomi. (BRO)

Judul	**Membangun Hingga Pelosok Negeri**	Tanggal	Senin, 04 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman 4)		
Resume	Dalam empat tahun (2015-2019), pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia serta peningkatan daya saing nasional.		

Membangun hingga Pelosok Negeri

Dalam empat tahun (2015-2019), pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia serta peningkatan daya saing nasional.
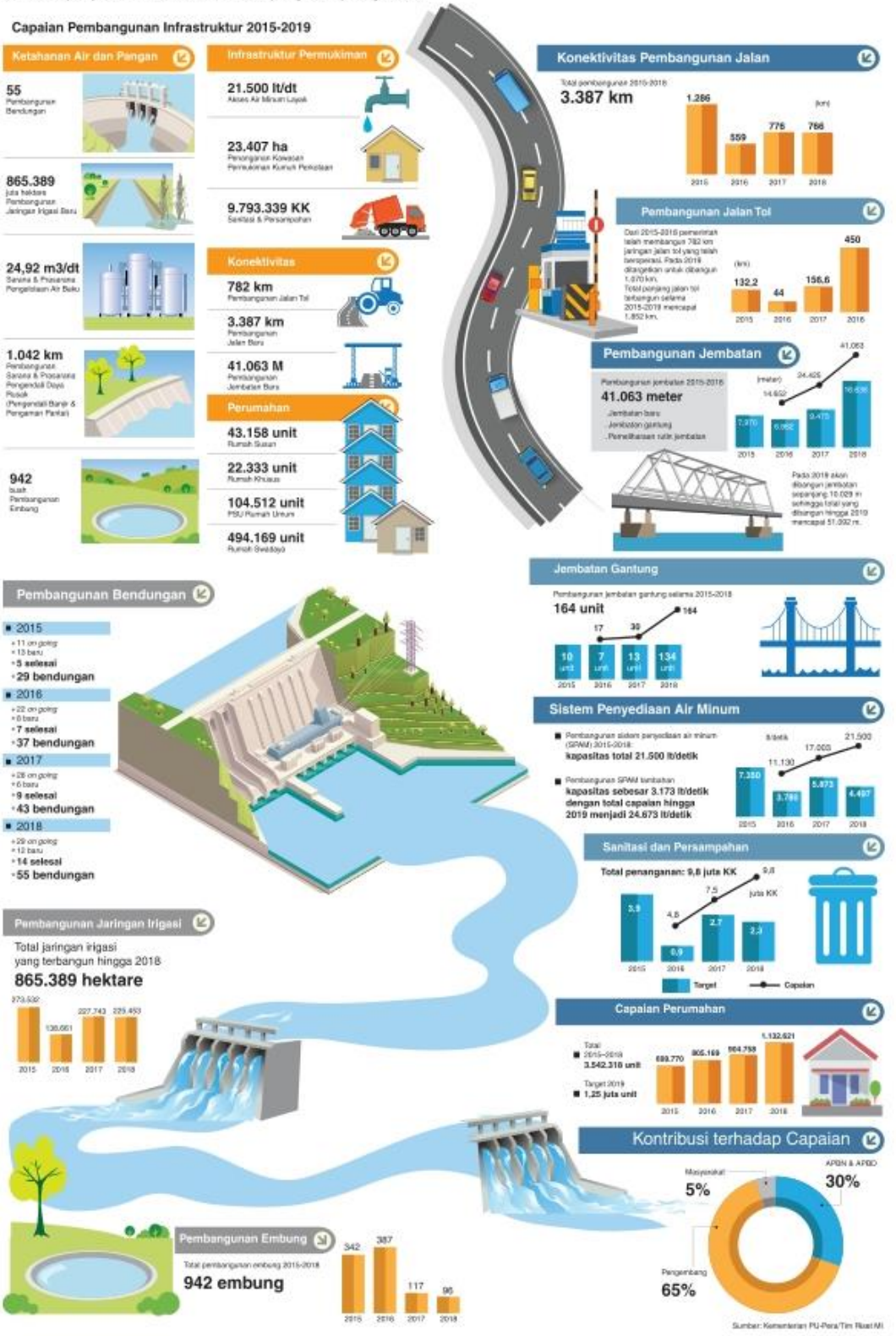
Capaian Pembangunan Infrastruktur 2015-2019